

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Widi. 2008. *Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Muatan Lokal*. Yogyakarta: FIP UNY
- Adisasmita. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dunga, P. 2006. *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Baharupa.
- Djalal, Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicipta.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Gilbert. 1996. *Peran Pemerintah dalam sumber Pembangunan Sampah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1997. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu. 2011. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi, Adi. 2007. *Perencanaan partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Mardikanto, Totok, Soebiato, et al. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.
- Oakley, Peter. 1991. *Project White People: The Practice of Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.
- Suryawan, B. 2004. *Karakteristik Zeolit Indonesia Sebagai Adsorben Uap Air*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Slamet. 2002. *Membentuk pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Pres.

- Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sastropoetro, S. 1995. *Partisipasi, Komunikasi Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Sunarti. 2003. *Partisipasi Dalam Pembangunan Perumahan Secara Kelompok*. Jurnal Tata Loka. Semarang: Planologi UNDIP.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Ranika Cipta.
- Wijaya. 2004. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*. Semarang: Bintang Jay.
- Republik, Indonesia. *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan*.
- Republik, Indonesia. *Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.
- Republik, Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Republik, Indonesia. *Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi*.
- Republik, Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Republik, Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik, Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Republik, Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perrindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Subjek : RW 5 Pasar Minggu  
 Nama Subjek : Tutik  
 Media : Langsung Wawancara

### TRANSKRIP WAWANCARA PERTAMA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur tentang lingkungan terutama sampah di tingkat RW?	Ada, loh itu salah satunya yang ada di judul skripsimu toh
2.	Apakah Ibu tau terkait Pergub DKI No.77?	Iya saya tahu, wong itu terbentuk karena kita mengadakan permasalahan sampah di tahun 2019
3.	Apakah Ibu ikut andil dalam memberikan saran atau masukan dan kritik dalam masalah lingkungan?	Jadi pada saat itu masyarakat yang bersikeras kepada Pak RT dan saya agar masalah sampah ini diadakan ke kelurahan dan kecamatan agar segera ditangani
4.	Kepada siapa Ibu memberikan saran tersebut?	Lho justru masyarakat yang mendesak kami agar masalah sampah ini diseriusi oleh pemerintah setempat. Jadi kami selaku RW beserta RT yang terdampak mengumpulkan warga di lapangan lalu memberikan kesempatan pada warga untuk menyuarakan aspirasinya. Setelah kami himpun saran yang warga telah berikan, saran warga tadi kami tindaklanjuti dan berikan ke Kelurahan Pasar Minggu

No	Pertanyaan	Jawaban
5.	Apakah masyarakat juga ikut andil atau dilibatkan dalam hal tersebut?	<p>Iya tadi kan saya sudah bilang toh. Setelah kami tampung aspirasi warga, saya berkoordinasi dengan Pak RT untuk berinisiatif memberitahu masalah ini ke Bu Lurah. Untungnya Bu Lurah <b>tanggap menangani</b> masalah ini. Tapi pada awalnya, sebenarnya itu pada awalnya, kami didesak oleh masyarakat yang memang RT-nya itu terdampak. Nah kebetulan korban merupakan salah satu anggota organisasi kemasyarakatan. Memang kebanyakan dari kelompok masyarakat yang mendesak berasal dari organisasi itu, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak dapat menyebutkan organisasi tersebut ya, kita sama-sama ngerti lah ya dek Hizkia. Setelah kami menyampaikan aspirasinya yang tadi Ibu sudah bilang yang warga dikumpulin di lapangan, terus kita menyampaikan ke Kelurahan Pasar Minggu. Memang pada awalnya kami <b>mendapatkan penolakan</b> dari beberapa staff yang bekerja di sana, setelah negosiasi, Alhamdulillah kami diizinkan untuk menyampaikan secara langsung kepada Ibu Gita. Ya mungkin dikiranya kami mau demo kali ya di depan Kantor Lurah itu ya. Soalnya kami ketika berkunjung ke Kantor Lurah itu kami ditemani oleh beberapa teman-teman dari ormas tersebut, tapi hanya salah paham</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
		toh rupanya.
6	Adakah peraturan yang lahir dari usulan masyarakat Pasar Minggu yang ditampung di Ibu?	Alhamdulillah gak lama kemudian lahirlah Peraturan Gubernur DKI No.77 di DKI ini.



Subjek : Lurah Pasar Minggu

Nama Subjek : Gita Puspita Sari

Media : Zoom

### TRANSKRIP WAWANCARA KEDUA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana partisipasi politik di Kelurahan Pasar Minggu?	Untuk partisipasi politik Pasar Minggu sudah berjalan dengan baik, walaupun terdapat kendala di tahun 2019-2020 karena dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Misalnya kebijakan <i>lockdown</i> dan lain sebagainya, karena adanya kendala tersebut bukan hanya memengaruhi partisipasi politik tapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Pasar Minggu.
2.	Apakah ada partisipasi politik di tingkat RT ataupun RW?	Tentu ada seperti ada program kerja bakti yang di mana itu diusulkan oleh ketua RT 6 dan 7. hal ini berangkat dari keluhan masyarakat terkait banyaknya sampah di lingkungan. Lalu dari keresahan masyarakat ini ketua RT dan ketua RW menyampaikannya kepada pemerintah desa. Kelurahan Pasar Minggu sangat mendukung adanya program tersebut dan juga lurah atau kelurahan juga bekerja sama dengan PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) untuk tetap melaksanakan kerja bakti tersebut.
3.	Apakah masyarakat Pasar Minggu di libatkan dalam pembuatan peraturan atau kebijakan?	Ini bersinggungan dengan pertanyaan nomor 2 tadi yang di mana terdapat keresahan atau

No	Pertanyaan	Jawaban
		keluhan dari masyarakat yang di mana yang menampung tersebut adalah ketua RT lalu aspirasi dari masyarakat ini di sampaikan oleh RT kepada lurah Pasar Minggu.
4.	Apakah Ibu mengetahui tentang Pergub DKI No.77	Iya saya mengetahuinya yaitu tentang pengelolaan sampah di tingkat RW
5.	Bagaimana tanggapan masyarakat terkait permasalahan sampah tersebut?	Bersinggungan di nomor satu, yaitu pada tahun 2019 banyaknya keluhan dari masyarakat hal ini disebabkan keran ketidakmampuan TPS Pasar Minggu untuk menampung sampah lagi. Sehingga ada sebagian warga yang menimbun sampah dan menunggu adanya pemberitahuan dari kelurahan apakah TPS tersebut dapat digunakan kembali. Hal ini juga memicu kebakaran yang terjadi ke perumahan di masyarakat Pasar Minggu karena dari pembakaran sampah yang menimbulkan kebakaran rumahnya
6.	Apakah Ibu selaku Lurah atau Pemerintah Desa ini ikut andil dalam pembuatan Pergub DKI No.77?	Sudah jelas saya selaku lurah ikut andil, karena jelas kami membawa aspirasi masyarakat Pasar Minggu yang di mana ini merupakan keluhan terkait kurangnya penanganan sampah sehingga saya juga ikut andil dalam atau mewakili dari apa yang masyarakat butuhkan atau menyuarakan aspirasi masyarakat tersebut dengan cara mendorong terbentuknya kebijakan dari pemerintah di atas pemerintahan

No	Pertanyaan	Jawaban
		desa karena kami juga memiliki prosedur.
7.	Apa output yang di rasakan langsung oleh masyarakat terkait kebijakan yaitu Pergub DKI No.77?	Jelas ada ini juga bentuk penyerapan aspirasi masyarakat dan ini juga arahan langsung dari bapak Heru Budi Hartono selaku penanggung jawab dalam Pergub DKI No.77 dan juga dibukakan kembali bilik pengaduan masyarakat terutama di kelurahan





Subjek : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan

Nama Subjek : Muhammad Amin

Media : Zoom

### TRANSKRIP WAWANCARA KETIGA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak mengetahui tentang Pergub DKI No.77 Tahun 2020?	Jadi isi dari Pergub tersebut adalah tentang pengelolaan sampah dalam lingkup Rukun Warga (RW)
2.	Apakah Kelurahan Pasar Minggu telah melakukan peraturan gubernur tersebut?	Kebijakan ini telah terlaksana dan juga kami selaku DLH juga bekerja sama dengan kecamatan dan juga kelurahan khususnya di Pasar Minggu
3.	Apakah ada permasalahan dalam pengelolaan sampah terkhusus sebelum muncul atau lahirnya Pergub DKI No.77?	Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai hari permasalahan sampah memang masih ada, namun dengan adanya Pergub ini juga ada hasilnya yaitu berupa penurunan masalah sampah, walaupun masih ada masalah namun sudah tidak sebanyak sebelum lahirnya kebijakan tersebut.
4.	Apa yang dilakukan pemerintah dalam melihat atau merespon dari keluhan terkait permasalahan sampah oleh masyarakat Pasar Minggu sebelum lahirnya Pergub DKI No.77?	Hal ini berangkat dari keluhan masyarakat Pasar Minggu yang di proses oleh RT ataupun RW lalu di adukan kepada lurah dan selanjutnya lurah menanggapi keluhan tersebut yang menjadi persoalan di masyarakatnya lalu lurah tersebut juga konsultasi atau mengadukan kepada kecamatan dan nantinya diproses oleh

No	Pertanyaan	Jawaban
		pemerintah atas yang memang fokus di dalam lingkungan.
5.	Apakah ada peran dari masyarakat dalam terbentuknya Pergub DKI No.77 tersebut?	Jelas ada karena jika tidak ada laporan atau keluhan dari masyarakat maka permasalahan seperti ini tidak mungkin diproses. Masyarakat berperan penting dalam proses terwujudnya sebuah kebijakan ini namun tetap dengan prosedural yaitu dengan memberikan aduan atau laporan lalu kami memproses dan ini kami ajukan kepada Wali kota dan Bapak Wali kota menyampaikan ini kepada gubernur yang akhirnya terciptanya kebijakan tersebut.



## LAMPIRAN

1. Dokumentasi Saat Penyerahan Surat Permohonan Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan



Lampiran 1

2. Dokumentasi Saat Penyerahan Surat Permohonan Penelitian ke Kecamatan Pasar Minggu



Lampiran 2

3. Dokumentasi Saat Penyerahan Surat Permohonan Penelitian ke Kelurahan Pasar Minggu



Lampiran 3

4. Dokumentasi Saat Wawancara Melalui Zoom Meeting Dengan Ibu Gita Puspita Sari Selaku



Lampiran 4

5. Dokumentasi Saat Wawancara Melalui Zoom Meeting Dengan Pak Mohamad Amin, S.Si, M.M Selaku Perwakilan Pihak Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan



## Skripsi Willem 3 Feb 2023

### ORIGINALITY REPORT

**29%**

SIMILARITY INDEX

**29%**

INTERNET SOURCES

**5%**

PUBLICATIONS

**12%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://eprints.umpo.ac.id">eprints.umpo.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id">ejournal.unsrat.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1%
5	<a href="http://selatan.jakarta.go.id">selatan.jakarta.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://e-journal.upr.ac.id">e-journal.upr.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jakarta.go.id">jakarta.go.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	1%